

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, sepanjang tahun 2017 – 2019 UNESCO telah melakukan beberapa upaya atau kontribusi terhadap pembangunan kota inklusif di Banjarmasin. Kota Banjarmasin sendiri merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki komitmen tinggi dalam menjadikan kotanya sebagai Kota Inklusif Disabilitas. Hal tersebut dilandasi oleh adanya pembentukan beberapa regulasi seperti Peraturan Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Walikota No. 352 Tahun 2016 untuk pembentukan Forum Antar Lembaga Kota Banjarmasin untuk Disabilitas. Namun pada implementasinya, kebijakan kota inklusif di Banjarmasin terhambat oleh kurangnya data penyandang disabilitas yang valid sebagai *input* untuk membentuk suatu kebijakan atau regulasi ke depannya bagi penyandang disabilitas di Banjarmasin. Maka dari itu, UNESCO melakukan serangkaian upaya untuk menangani permasalahan data disabilitas di Banjarmasin dengan melibatkan Pemerintah Kota, LSM, ataupun penyandang disabilitas itu sendiri.

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh UNESCO di Kota Banjarmasin adalah terlibat dalam pembentukan Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif. Piagam ini merupakan hasil komitmen para walikota Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin, untuk membangun sebuah kota yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Piagam ini berisikan prinsip-prinsip yang termuat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities / UNCRPD*) dan disesuaikan dengan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam piagam ini disebutkan bahwa pemerintah kota harus membentuk kebijakan inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas. Sejalan dengan piagam ini, UNESCO juga menerbitkan Instrumen Penilaian Kota Inklusif yang disusun untuk menjadi acuan

pemerintah kota dalam mengimplementasikan piagam tersebut. Instrumen penilaian ini berisikan 11 sektor di antaranya seperti sektor data, transportasi umum dan partisipasi politik. Pada upaya ini, UNESCO menjalankan perannya sebagai arena dan fungsi norma serta pembuat peraturan.

Kegiatan kedua yang dilakukan oleh UNESCO adalah melaksanakan proyek pengumpulan data penyandang disabilitas yang dikerkolaborasi bersama Kota Kita. Pengumpulan data ini dilakukan dikarenakan Pemerintah Indonesia belum memiliki sistem data disabilitas yang terintegrasi sehingga tidak ada acuan data yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membuat arah kebijakan. Berdasarkan fakta yang ditemui, penyusunan *road map* inklusif oleh Pemkot Banjarmasin sendiri mengalami hambatan pada permasalahan data disabilitas. Melalui proyek ini, UNESCO membuat sebuah metode pengumpulan data partisipatif yang melibatkan penyandang disabilitas sehingga Pemkot Banjarmasin dapat mengetahui jumlah, persebaran, karakteristik dan kebutuhan penyandang disabilitas yang ditemukan langsung di lapangan. Pada kontribusi ini, UNESCO menjalankan fungsi operasionalnya dalam memberikan dukungan teknis kepada Pemkot Banjarmasin dan melaksanakan fungsi penyedia informasi karena proyek ini menghasilkan beberapa *output* informasi seperti publikasi data, lokakarya maupun video yang ditayangkan di situs resmi UNESCO Jakarta.

Kegiatan terakhir yang diberikan UNESCO dalam membangun kota inklusif di Banjarmasin adalah ikut menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif ke-8 di Banjarmasin. UNESCO menyediakan area bagi para wali kota Indonesia untuk berdiskusi mengenai kebijakan yang perlu diambil dalam membangun sebuah kota yang inklusif. Hal terpenting yang dilaksanakan saat pertemuan ini adalah diadakannya Lokakarya Perencanaan dan Pembangunan Kota Inklusif Disabilitas Berbasis Data. Lokakarya atau *workshop* ini merupakan sebuah pelatihan yang diberikan oleh UNESCO kepada pemerintah kota dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan yang terdapat dalam piagam jaringan khususnya dalam sektor data. Pada kegiatan ini, UNESCO menjalankan perannya sebagai arena untuk menjalankan diskusi dan menjalankan fungsi operasionalisasinya yaitu dengan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan bagi pemerintah kota.

Dike Aseilla, 2022.

**PERAN UNESCO DALAM KEBIJAKAN KOTA INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANJARMASIN DALAM RANGKA Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-11 Tahun 2017-2019**

85

Tanggapan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap kontribusi yang diberikan oleh UNESCO sangat positif. Melalui data penyandang disabilitas yang baru, Pemkot Banjarmasin mendapatkan informasi baru terkait penyebaran penyandang disabilitas di kotanya dan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan yang ramah disabilitas. Pemanfaatan data ini di antaranya dilakukan oleh KPU Banjarmasin pada pemilihan umum 2019. Pada data sebelumnya hanya sebanyak 900 disabilitas yang memiliki hak pilih, padahal di lapangan ditemukan 3.297 penyandang disabilitas yang berhak mengikuti pemilu. Dalam situasi krisis di Banjarmasin, data ini juga dimanfaatkan oleh Dinas Sosial Banjarmasin dalam menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas pada awal pandemi COVID-19 dan banjir pada tahun 2021. Proyek pengumpulan data ini menjadi salah satu *awardee Innovative Zero Barriers* sebagai inisiatif paling berpengaruh yang diadakan oleh ASHOKA Foundation dan menjadi *database* Kota Banjarmasin dalam memenangkan TUMI (*Transformative Urban Mobility Initiative*) 2019 untuk membantu mobilitas bagi para penyandang disabilitas di Banjarmasin.

Peran UNESCO dalam membantu Kota Banjarmasin menjadi sebuah kota inklusif bagi penyandang disabilitas mencakup beberapa aspek seperti pengadaan instrumen kerja sama melalui piagam jaringan, penciptaan metode melalui proyek pengumpulan data penyandang disabilitas, dan melakukan *capacity building* yang dapat diadopsi bagi seluruh pemerintah kota melalui pengadaan lokakarya. Kontribusi yang diberikan UNESCO bagi pembentukan kebijakan kota inklusif di Banjarmasin tergolong berhasil dengan memberikan *domino effect* di beberapa sektor seperti peningkatan partisipasi politik yang ditandai dengan bertambahnya hak pilih bagi difabel, pengembangan moda transportasi melalui TUMI 2019, menjadi inisiatif paling berpengaruh yang diadakan oleh ASHOKA Foundation, dan meningkatkan penerimaan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa peran UNESCO dalam kebijakan kota inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sepanjang tahun 2017-2019 ditunjukkan melalui kontribusi UNESCO dalam beberapa kegiatan seperti pembentukan Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif, membuat Instrumen Penilaian Kota Inklusif, melaksanakan proyek pengumpulan data partisipatif bagi

penyandang disabilitas, menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif ke-8 dan melaksanakan Lokakarya Perencanaan dan Pembangunan Kota Inklusif Disabilitas Berbasis Data di Banjarmasin.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Saran Praktis**

Saran penulis kepada UNESCO adalah dapat mengevaluasi lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan yang terjadi di Kota Banjarmasin pasca proyek pengumpulan data dilakukan. Bila dilakukan evaluasi maka lebih terlihat jelas bagaimana perkembangan kebijakan kota inklusif di Banjarmasin. UNESCO juga perlu mendorong kota-kota lain untuk serius dalam mengimplementasikan semua kesepakatan yang terdapat di piagam jaringan. Piagam jaringan hanya akan menjadi sia-sia apabila hanya satu atau dua kota yang serius dalam membangun kota inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat membenahi regulasi mengenai data penyandang disabilitas sebagai bentuk implementasi dari ratifikasi UNCRPD. Untuk Pemerintah Kota Banjarmasin, penulis menyarankan untuk menambah, membenahi, maupun mengoreksi kebijakan mengenai inklusivitas penyandang disabilitas sesuai dengan data partisipatif yang disusun oleh UNESCO dan Kota Kita. Penulis menyarankan, untuk ke depannya pemerintah di kota lain dapat mengadopsi proyek pengumpulan data ini secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan pentingnya data sebagai instrumen utama dalam proses pembuatan kebijakan. Apabila data telah terkumpul dengan baik dan valid, maka arah kebijakan kota inklusif di masing-masing kota dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, perubahan *mindset* tentang mahal biaya pembangunan infrastruktur inklusif harus dihilangkan dan menganggap pembangunan inklusif merupakan investasi untuk semua orang.

### **6.2.2 Saran Teoritis**

Saran teoritis yang dapat penulis berikan adalah mengenai sudut pandang analisis, mengingat analisis yang penulis gunakan adalah tentang peran organisasi internasional sehingga sudut pandang yang dihasilkan hanya berfokus pada UNESCO dan kurang mengeksplorasi aktor lain. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan konsep kerja sama karena UNESCO cukup

banyak mengadakan kerja sama dengan LSM, pemerintah kota, atau organisasi yang ada di Indonesia mengenai pembangunan kota inklusif sehingga penelitian selanjutnya dapat dianalisis dari konsep yang berbeda. Penelitian ini memiliki keterbatasan analisis dikarenakan sumber data primer yang ada hanya berupa wawancara dengan Kota Kita dan laporan UNESCO lainnya. Untuk mengisi kekurangan sumber data primer dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat menambahkan sumber wawancara baik dari pihak UNESCO maupun Pemerintah Kota Banjarmasin agar analisis yang dihasilkan lebih mutakhir dan mendapatkan sudut pandang yang lebih luas.